

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Artikel

- Atiyah, P.S., John N. Adams, dan Hector Macqueen. *The Sale of Goods*. 10th Edition. (London: Henry Ling Ltd., at Dorsel Press, 2001).
- Badruzaman, Mariam Darus, *et.al.* *Kompilasi Hukum Perikatan*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001).
- Badruzaman, Mariam Darus. *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*. Edisi Kedua. (Bandung: Alumni, 1996).
- Beatson, J. *Law of Contract*. (New York: Oxford University Press, 2002).
- Black, Henry Cambell. *Black's Law Dictionary: Definition of Terms & Phrases of American & English Jurisprudence, Ancient & Modern*. Ed. ke-6 (St. Paul, Minn: West Publishing Co., 1990).
- Bridge, Michael. *The Sale of Goods*. (New York: Oxford University Press, 1997).
- Brodecki, Zdzislaw. *Polish Business Law* (Nederlands: Kluwer Law International. The Hague, 1992).
- Engelbrecht. (Jakarta: PT Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1992).
- Fridman, GHL. *The Law of Agency*. (London: Butterworth & Co. Ltd., 1990).
- Harahap, M. Yahya. *Berbagai Permasalahan Formil dalam Gugatan Perdata*. Varia Peradilan. Majalah hukum Ikahi. Tahun IX Nomor 99 (Desember 1993).
- \_\_\_\_\_. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2004).
- \_\_\_\_\_. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. (Jakarta: Gramedia, 1994).
- Harvey, Brian W. and Franklin Meisel. *Auction Law and Praise*. (London: Butterworth & Co, 1985).
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, (Jakarta: PT Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1992).
- Indroharto. Ketua Muda MARI. Beberapa Pasal dari Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam buku, Padmo Wahyono, dkk. *Pejabat sebagai*

*Calon Tergugat dalam Peradilan Tata Usaha Negara*. Buku Kesatu. (Jakarta: CV Sri Rahayu, 1989).

Krishna, Vijay. *Auction Theory*. (Florida USA: Academic Press, 2002).

Lotulung, Paulus Effendie. *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*. (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 1986).

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Yurisprudensi Mahkamah Agung-Republik Indonesia*. Jakarta: Oktober 1998.

Mantayborbir, S. dan Iman Jauhari. *Hukum Lelang Negara di Indonesia*. (Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2003).

Mamudji, Sri, *et.al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005).

Manan, Bagir. "Peran Hakim dalam Dekolonialisasi Hukum" dalam Satjipto Rahardjo. *Wajah Hukum di Era Reformasi*. (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2000).

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1988).

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Lelang. Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara, Biro Hukum-Sekretariat Jendral. Jakarta, 18 Februari 2005.

Ngadijarno, F.X., Nunung Eko Laksito, dan Isti Indri Listiani. *Lelang: Teori dan Praktek* (Bab III: Ruang Lingkup Lelang). <<http://www.bppk.depkeu.go.id/index.php/lelang-teori-dan-praktek/view-category.html>>.

Podhista, Chai. "Theoretical, Terminological, and Philosophical Issue in Qualitative Research". Dalam Attig, *et.al. A Field Manual on Selected Qualitative Research Methods* (Thailand: Institute for Population and Social Research, Mahidol University, 1991).

Sianturi, Purnama Tiora. *Perlindungan Hukum terhadap Pembeli Barang Jaminan tidak Bergerak melalui Lelang*. Cet. ke-1 (Bandung: CV mandar Maju, 2008).

Sibarani, Bachtiar. "Masalah Hukum Privatisasi Lelang". *Jurnal Keadilan*. Volume 4. Nomor 1 Tahun 2005/2006.

Sjahdeini, Sutan Remy. "Komentar Pasal demi Pasal Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia". *Jurnal Hukum Bisnis*. (Volume 10: 2000).

- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986).
- Soemaryono dan Anna Erliyana, *Tuntutan Praktik Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara, cet. ke-1* (Jakarta: PT Primamedia Pustaka, 1999), hal. 43.
- Soemitro, Rochmant. *Peraturan dan Instruksi Lelang*. Edisi ke-2 (Bandung: PT Eresco, 1987).
- Soesanto, R. *Tugas, Kewajiban dan Hak-Hak Notaris, Wakil Notaris (Sementara)*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978).
- Subekti dan Tjitrosudijo. *Kamus Hukum*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1973).
- Sutantio, Retnowulan, *et.al. Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Cet. VI (Bandung: Mandar Maju, 1989).
- Sutardjo, F.X.. “Mekanisme dan Berbagai Aspek Penjualan Tanah Secara Lelang”. Makalah disampaikan pada Kursus Kuasa Hukum Bagi Pejabat BPN yang diselenggarakan oleh FHUI. Depok. Pebruari 1995.
- \_\_\_\_\_. “Pelelangan Barang-Barang dalam Rangka Pemberesan Harta Pailit”. Makalah disampaikan dalam pendidikan Kurator dan pengurus yang diselenggarakan oleh Kurator dan Pengurus Indonesia bekerjasama dengan Departemen Hukum dan HAM. Agustus 2008.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945*.
- \_\_\_\_\_. *Burgelijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Staatsblad. 1847 No. 23.
- \_\_\_\_\_. *Herziene Inlandsch Reglement*. Staatsblaad 1941 No. 44.
- \_\_\_\_\_. *Vendu Reglement* (Undang-Undang Lelang). Staatsblad 1908 No. 189.
- \_\_\_\_\_. *Vendu Instructie* (Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Lelang) Staatsblad 1908 No. 190.
- \_\_\_\_\_. *Reglement op de Burgelijk Rechtsvordering*. Staatsblaad 1927 No. 227.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah*. UU No. 4, LN No. 42 Tahun 1996, TLN No. 3632.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia*. UU No. 42, LN No. 168 Tahun 1999, TLN No. 3889.

- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Jabatan Notaris*. UU No. 30, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*. UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157, TLN No. 5076.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang*. UU No. 37, LN No.131 Tahun 2004, TLN No. 4443.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*. UU No. 8, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Perbankan*. UU No. 7, LN No. 31 Tahun 1992, TLN No. 3472.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*. UU No. 10, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. UU No. 5, LN No. 77 Tahun 1986, TLN No. 3344.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. UU No. 9, LN No. 35 Tahun 2004, TLN No. 4380.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. UU No. 51, LN No. 160 Tahun 2009, TLN No. 5079.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Panitia Urusan Piutang Negara*, LN No. 156 prp Tahun 1960, TLN No. 2104.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*. UU No. 19, LN No. 129 Tahun 2000, TLN No. 3987.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara*. UU No. 1, LN No. 5 Tahun 2004, TLN No. 4355.
- \_\_\_\_\_. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- \_\_\_\_\_. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2003 tentang Pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- \_\_\_\_\_. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

\_\_\_\_\_. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan atau pemindahtanganan barang-barang yang dimiliki atau dikuasai negara.

\_\_\_\_\_. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2005 tanggal 30 November 2005 tentang Balai Lelang.

\_\_\_\_\_. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2005 tanggal 30 November 2005 tentang Pejabat Lelang Kelas II.

\_\_\_\_\_. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2006 tanggal 30 Mei 2006 tentang Pejabat Lelang Kelas I.

\_\_\_\_\_. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

